

Major Power in the Making: Analisis Komprehensif Status Indonesia dalam Hirarki Politik Internasional, 2014-2024

Mohamad Rosyidin¹, Indra Kusumawardhana²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia

² Universitas Pertamina, Indonesia

ARTICLE INFO

Date received: 28 May 2023
Revision date: 01 October 2023
Date published: 01 November 2023

Keywords

Indonesia's status;
comprehensive analysis;
intermittent major power;
great power mentality

Correspondence

Email:

mohamad.rosyidin@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's status as a middle power has become a commonsense in contemporary International Relations (IR) literature. Existing scholarships on this topic rely on a behavioral approach, emphasizing foreign policy characteristics in defining Indonesia's status. Other scholars employ a material approach, measuring Indonesia's economic as well as military capabilities. Previous studies have tended to overlook social and psychological elements of Indonesia's international standing. This paper argues that Indonesia's status cannot be determined by partial perspectives. Rather, it requires a comprehensive analysis by incorporating material, behavioral, social, and psychological elements to determine Indonesia's status at the global level. Based on a comprehensive analysis of Indonesia's foreign policy during Joko Widodo administration (2014-2024), this paper contends that Indonesia can be classified as an intermittent major power, that is, a country that not only aspires to be a major power but also ascending the hierarchy of international politics. In other words, Indonesia is a major power in the making. This idea supports the claim that Indonesia has a great power mentality stemming from its glorious past. This explains why Indonesia's foreign policy frequently exhibits great power aspirations

PENDAHULUAN

Kajian tentang status dalam studi Hubungan Internasional (HI) telah menarik banyak minat akademisi setidaknya selama 10 tahun belakangan (lihat misalnya, Volgy, Corbetta, Grant dan Baird, 2011; Paul, Larson dan Wohlforth, 2014; Renshon, 2017; Ward, 2017; 2019; Murray, 2018; Larson and Shevchenko, 2010; 2019; Ward, 2019). Sayangnya, literatur tentang status dalam politik luar negeri Indonesia amat langka. Kecuali karya Karim (2018), mayoritas literatur lebih tertarik menyoroti karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang selaras dengan konsep middle power diplomacy (lihat misalnya, Ping, 2005; Hidayatullah, 2017; Alfian, Putri dan Ardhani, 2018; Thies dan Sari, 2018; Anwar, 2020; Karim dan Nabila, 2022; Rosyidin dan Ramadhani, 2023; Rosyidin dan Kusumawardhana, 2024). Meski tidak menyinggung soal status, semua literatur menerima begitu saja klaim bahwa status Indonesia adalah negara middle power. Di luar kajian-kajian tadi, tak banyak literatur yang secara khusus menganalisis status Indonesia dalam politik internasional. Beberapa literatur menyinggung tentang posisi Indonesia sebagai 'third Asian giant' (Reid, 2012), 'emerging democratic power' (Acharya, 2014), 'rising middle power' (Robert, Habir and Sebastian, 2015), dan 'Indo-Pacific power' (Shekhar, 2018). Namun demikian, literatur tersebut belum ada yang melakukan kajian sistematis dan mendalam terkait bagaimana cara menentukan status Indonesia di dalam hirarki politik internasional.

Tulisan ini ingin mengisi celah literatur dengan menawarkan analisis status Indonesia dalam politik internasional. Namun, berbeda dengan kebanyakan literatur yang melihat dari aspek behavioral – corak kebijakan luar negeri – tulisan ini akan menggabungkan empat pendekatan – realis, English School, konstruktivis, dan psikologi – untuk menentukan status Indonesia. Tulisan ini berpendapat bahwa status Indonesia di dalam struktur hirarki politik internasional tidak dapat dipahami hanya melihat dari dimensi material (realis) yang menitikberatkan melulu pada faktor militer atau dimensi behavioral (English School) yang menitikberatkan pada karakter diplomasi Indonesia. Status Indonesia juga perlu melihat bagaimana pengakuan internasional terhadap Indonesia (konstruktivis) serta, yang tak kalah penting, bagaimana Indonesia memandang jati dirinya di kancah internasional (psikologis).

Berdasarkan klaim tersebut, tulisan ini mengajukan tesis bahwa Indonesia bukan middle power tetapi “intermittent major power” yaitu negara yang memiliki ambivalensi status yaitu sebagai middle power namun di saat yang sama juga merasa sebagai negara besar. Ambivalensi ini erat kaitannya dengan status Indonesia sebagai “upper-middle power” yaitu negara yang sudah di fase mendekati status sebagai negara besar. Dilihat dari dimensi material (ekonomi dan militer), Indonesia masih tergolong kekuatan menengah. Dilihat dari dimensi behavioral (karakter diplomasi), Indonesia memiliki karakter negara besar meskipun juga konsisten dengan diplomasi kekuatan menengah. Dilihat dari dimensi sosial (pengakuan internasional), Indonesia sudah termasuk negara besar. Terakhir, dilihat dari dimensi psikologis (konsepsi diri), Indonesia merasa dirinya sebagai negara besar. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, tulisan ini berargumen bahwa menentukan status negara besar hanya dari dimensi material dan/atau sosial saja kurang memadai. Status negara besar merupakan kategorisasi yang kompleks, melibatkan banyak variabel yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh sebab itu, tulisan ini menawarkan pendekatan komprehensif dalam menentukan status negara besar Indonesia.

Tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Bagian berikutnya menguraikan pendekatan metodologis dan ruang lingkup kajian. Tulisan ini mengadopsi pendekatan multi-metode yang menggabungkan beberapa perspektif teoretis dalam satu konstruksi analisis. Sedangkan dari segi ruang lingkup, tulisan ini berfokus pada kebijakan luar negeri Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode pemerintahannya (2014-2024). Bagian selanjutnya adalah analisis dimana masing-masing dari keempat pendekatan tadi akan dipakai untuk melihat sejauh mana status Indonesia di masa sekarang. Bagian terakhir adalah penutup yang merangkum hasil analisis serta implikasinya bagi pengembangan teori tentang status dalam studi HI serta bagi kepentingan perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini tidak menggunakan satu paradigma keilmuan untuk menganalisis status Indonesia. Alih-alih, tulisan ini menggabungkan empat paradigma – realis, English School, konstruktivis, dan psikologi – sebagai kerangka analisis. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menentukan status suatu negara tidak bisa hanya melihat pada satu dimensi melainkan perlu mempertimbangan semua dimensi, baik itu material, behavioral, sosial, maupun psikologis. Keempatnya mewakili empat pendekatan teoretis HI yang telah disebutkan sebelumnya. Pendekatan realis mengukur status negara dari kapabilitas materialnya, terutama ekonomi dan militer. Pendekatan English School mengukur dari peran dan tanggungjawab negara dalam menjaga tertib internasional. Pendekatan konstruktivis mengukur tingkat pengakuan internasional. Terakhir, pendekatan psikologis mengukur dari konsepsi diri negara mengenai identitasnya di kancah internasional. Tulisan ini mengaplikasikan pendekatan multi-metode atau methodological triangulation yang berupaya

mencampur dua atau lebih pendekatan. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan eklektis yang mencari hubungan antara dua paradigma berbeda agar penjelasan yang dihasilkan saling melengkapi (Sil and Katzenstein, 2010). Tulisan ini tidak mencari hubungan antar-paradigma. Setiap paradigma tetap diperlakukan secara terpisah dengan asumsinya masing-masing. Kombinasi antar-paradigma dilakukan semata-mata demi menarik kesimpulan yang tidak parsial. Oleh sebab itu, keempat pendekatan akan dianalisis secara bersamaan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Ruang lingkup tulisan ini adalah 10 tahun selama pemerintahan Jokowi (2014-2024). Ada sejumlah alasan dipilihnya rentang waktu tersebut. Pertama, pada periode tersebut politik luar negeri Indonesia menunjukkan aspirasi kuat menjadi negara besar (great power aspiration). Dua paling menonjol adalah strategi besar bertajuk 'Poros Maritim Dunia' dan peningkatan postur pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tulisan ini percaya dua kebijakan itu sama sekali tidak mencerminkan perilaku lazim sebagai negara middle power. Gagasan 'Poros Maritim Dunia' misalnya, tidak sekadar berorientasi di kawasan Asia Tenggara melainkan menjadikan Indonesia kekuatan maritim besar yang "ikut memengaruhi di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik" (Sukma, 2014). Hal ini mengisyaratkan kepentingan nasional Indonesia tak lagi berjangkauan regional melainkan kontinental atau global yang menjadi ciri khas negara besar (Levy, 1983:16). Peningkatan postur pertahanan secara masif di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sama sekali bukan tipikal kebijakan negara middle power. Sebagaimana dikatakan Levy (1983:17), negara-negara besar cenderung "defend their interests more aggressively and with a wider range of instrumentalities, including the frequent threat or use of military force." Walaupun Indonesia tidak menebar ancaman kepada negara lain, namun penguatan postur militer melalui modernisasi alutsista besar-besaran mencerminkan upaya mempertahankan supremasi di kawasan. Satu lagi, di masa pemerintahan Jokowi, Indonesia menduduki posisi-posisi penting dalam organisasi internasional serta pengakuan di sejumlah forum multilateral bergengsi seperti keketuaan di G20 dan diundang pada KTT BRICS di Afrika Selatan tahun 2023.

HASIL DAN DISKUSI

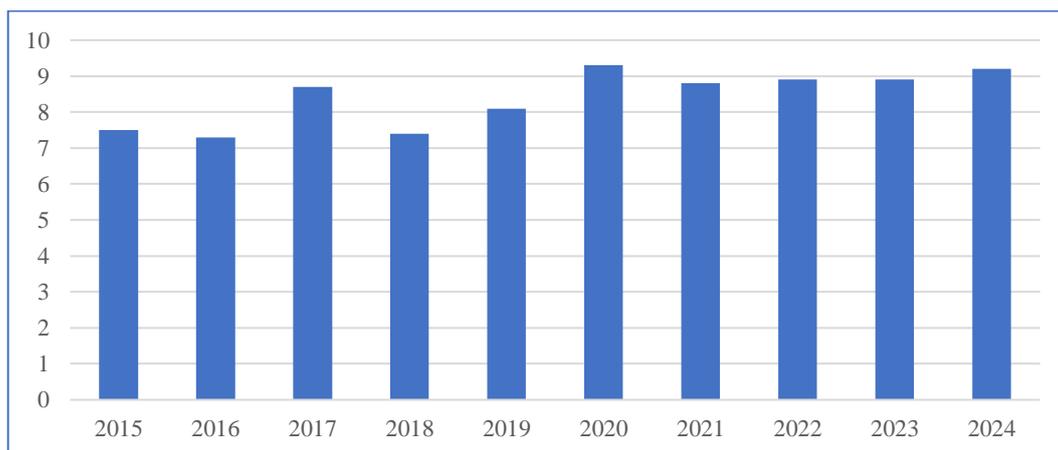
Dimensi material status Indonesia

Berbicara tentang perekonomian Indonesia, menurut IMF pada 2023 Indonesia menduduki peringkat 16 perekonomian terbesar di dunia dengan PDB US\$ 1.54 triliun. Ini artinya Indonesia berada di posisi kelima negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia setelah China (ranking dua), Jepang (ranking empat), India (ranking lima), dan Korea Selatan (ranking 13) atau yang terbesar di Asia Tenggara (IMF, 2024). Dari segi pendapatan per kapita, penduduk Indonesia rata-rata berpenghasilan US\$ 5.000 atau sekitar Rp. 75 juta per tahun. Sejak 2022, Bank Dunia menempatkan Indonesia berada di kategori upper middle-income country (World Bank, 2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup stabil di kisaran lima persen per tahun. Namun sempat anjlok menjadi minus tiga persen saat dihantam pandemi Covid-19 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil di angka lima persen sejak saat itu sampai tulisan ini ditulis. Dunia internasional mengakui perekonomian Indonesia termasuk kokoh di tengah guncangan global. Resesi dunia akibat perang Rusia-Ukraina tak banyak berdampak ke perekonomian Indonesia (Anas, Hill, Narjoko and Putra, 2022). Jadi meskipun secara nominal kekuatan ekonomi Indonesia masih di 20 besar dunia, namun dari aspek ketahanan ekonomi (economic resilience) Indonesia termasuk yang paling kokoh perekonomiannya. Hal ini memungkinkan Indonesia lolos dari jebakan krisis ekonomi sebagaimana dirasakan negara-negara maju.

Ketahanan ekonomi ini dipengaruhi salah satunya oleh rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB. Menurut data IMF, pada 2022 rasio utang Indonesia berada di angka 39.93 persen dari total PDB atau turun sebesar 1.21 persen dari tahun 2021 yang mencapai 41.14 persen dari PDB. Jika dibandingkan negara-negara maju lainnya, utang rasio utang Indonesia masih dikategorikan moderat. Jepang misalnya, memiliki rasio utang sebesar 261.29 persen dari PDB-nya. Sementara AS sebesar 121.38 persen dari PDB, Perancis sebesar 111.67 persen, Inggris sebesar 101.36 persen, Jerman sebesar 66.54 persen, China sebesar 77.1 persen, dan Brazil sebesar 85.33 persen (IMF, 2022). Menurut Bank Indonesia, jumlah utang Indonesia hingga tahun 2023 mencapai Rp. 8.041 triliun (CNBC Indonesia, 2023b). Menurut UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara, rasio utang maksimal adalah 60 persen dari PDB. Jadi dengan rasio utang pemerintah saat ini yang mencapai kisaran 40 persen dari PDB, perekonomian Indonesia masih dalam status aman terkendali.

Lantas bagaimana dengan postur pertahanan Indonesia? Indikator pertama kita lihat berdasarkan alokasi anggaran pertahanan. Berdasarkan data dari SIPRI, hingga tahun 2022 jumlah anggaran pertahanan Indonesia berada di kisaran US\$ 7.000 sampai dengan US\$ 9.000 atau 0.7 sampai dengan 0.8 persen dari PDB. Dengan alokasi anggaran ini Indonesia berada di peringkat 133 dunia negara dengan persentase anggaran militer terbesar di dunia (CIA, tanpa tahun). Grafik di bawah ini menunjukkan fluktuasi anggaran pertahanan Indonesia sejak Jokowi menjabat sebagai presiden. Pada 2015 pemerintah menganggarkan US\$ 7.5 milyar atau setara Rp. 112 triliun. Kemudian pada 2016 anggaran turun sedikit menjadi US\$ 7.3 milyar (Rp. 109.5 triliun). Tahun 2017 naik cukup signifikan menjadi US\$ 8.7 milyar (Rp. 130.5 triliun). Kemudian tahun 2018 turun lagi menjadi US\$ 7.4 milyar (Rp. 111 triliun). Tahun 2019 naik lagi menjadi US\$ 8.1 milyar (Rp. 121.5 triliun). Tahun 2020 di saat pandemi anggaran pertahanan malah naik menjadi US\$ 9.3 milyar (Rp. 139.5 triliun), kemudian turun lagi pada 2021 menjadi US\$ 8.8 milyar (Rp. 132 triliun) dan tahun 2022 naik sedikit menjadi US\$ 8.9 milyar (Rp. 133.5 triliun) (SIPRI, 2022). Pada 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp. 134 triliun (US\$ 8.9 milyar) dan 2024 naik menjadi Rp. 139 triliun (US\$ 9.2 milyar).

Grafik 1. Anggaran militer Indonesia, 2015-2024 (dalam US\$)
Sumber: SIPRI dan diolah dari penulis



Dari sisi pertahanan, postur militer Indonesia dapat dikatakan moderat. Menurut data dari International Institute for Strategic Studies (IISS), Indonesia memiliki 395.500 personel militer aktif. Dengan jumlah ini, Indonesia menduduki peringkat tujuh negara dengan jumlah personel militer terbesar di dunia. Indonesia masih kalah oleh Vietnam di posisi enam dengan jumlah personel

482.000 militer aktif. Dari jumlah itu, mayoritas adalah personel TNI AD sebanyak kurang lebih 300.000, TNI AL sebanyak 65.000, dan TNI AU sebanyak 30.000 personel (IISS, 2023:254). Sementara dari sisi kapabilitas militer secara keseluruhan, Indonesia berada di posisi 13 di Asia, masih kalah dari Singapura (ranking 9) dan Vietnam (ranking 12). Kemudian jika dilihat dari kemampuan alutsista baik di darat, laut, maupun udara, Indonesia berada di peringkat 14 di Asia. Tak mengherankan jika Lowly Institute Asia Power Index memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara kekuatan menengah (Patton, Sato and Lemahieu, 2023).

Kondisi alutsista yang bisa dikatakan tertinggal dari negara-negara lain, bahkan di tingkat regional sekalipun, membuat militer Indonesia diklaim tidak siap menghadapi perang modern (Jakarta Globe, 2023). Beberapa pakar pertahanan juga sepakat bahwa modernisasi militer Indonesia khususnya di matra laut dan udara gagal merespons tantangan global (Gindarsah and Priamarizki, 2021). Padahal, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kekuatan pokok minimum atau MEF ditargetkan telah tercapai 100 persen. Namun kenyataannya, pada 2021 MEF TNI hanya tercapai 62.31 persen dengan rincian TNI AU baru tercapai 51.51 persen, TNI AL baru tercapai 59.69 persen, dan TNI AD tercapai 76.23 persen (Kompas, 2023a).

Walaupun anggaran pertahanan Indonesia tergolong kecil – karena tak sampai satu persen dari PDB – namun pemerintah memiliki kebijakan yang cukup ambisius melakukan modernisasi militer. Hal ini dilakukan dengan belanja alutsista canggih baik untuk meremajakan alutsista yang sudah usang maupun memperkuat daya tangkal (deterrence) mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan teritorial. Pada 2018, ketika Kementerian Pertahanan masih di bawah Ryamizard Ryacudu, Indonesia akan membeli lima unit pesawat angkut militer Super Hercules C-130J dan empat unit helikopter Chinook CH-47 dari AS. Pada 2023 pemerintah telah menerima pesanan pesawat Super Hercules C-130J dan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma (Kementerian Pertahanan RI, 2023a). Tak sampai di situ, ketika Menteri Pertahanan dijabat Prabowo Subianto, Indonesia memesan 24 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dimana harga per unitnya mencapai US\$ 10.2 juta atau Rp. 156 milyar (Bisnis, 2023). Indonesia juga membeli beberapa unit kapal selam untuk memperkuat kemampuan tempur TNI AL. Salah satunya adalah kerjasama PT PAL dan Naval Group untuk membangun dua unit kapal selam kelas Scorpene. Kerjasama itu termasuk pengadaan persenjataan, suku cadang, dan pelatihan (CNBC Indonesia, 2023a). Yang paling fenomenal, Indonesia resmi mengakuisisi 42 unit jet tempur Dassault Rafale dimana unit pertama akan tiba pada 2026 (Kementerian Pertahanan RI, 2024). Selain itu, Indonesia juga membeli 24 unit jet tempur F-14EX dari AS (Kementerian Pertahanan RI, 2023b).

Dimensi behavioral status Indonesia

Karakteristik kebijakan luar negeri adalah unsur pokok status negara besar seperti dikemukakan penganut English School. Negara besar dicirikan oleh komitmen yang tinggi terhadap upaya pemeliharaan tertib internasional. Salah satu tokoh kunci English School, Martin Wight, mengatakan, “The great aim of statecraft, of foreign policy, is to pursue and safeguard the national interest within the setting of a respect for the interests of others, or of international society as a whole” (Wight, 1991:126). Menurut English School, kepentingan nasional tidak dapat dilepaskan dari kepentingan inter-nasional. Untuk menjamin kepentingan nasionalnya, negara harus mendahulukan kepentingan internasional karena kepentingan nasional tergantung pada kondisi sistemik politik global. Itulah sebabnya negara besar cenderung berperan aktif menjaga tertib internasional, bukan semata-mata untuk kepentingan dunia tetapi juga akan berimplikasi pada kepentingan nasionalnya.

Riset terbaru menyebutkan ada empat isu kebijakan luar negeri yang menjadi indikator status negara besar yaitu keamanan internasional, ekonomi internasional, humanitarianisme, dan lingkungan global. Menurut riset terbaru ini, untuk dapat dianggap sebagai negara besar suatu negara harus memainkan peran aktif di keempat isu tersebut (Nesmashnyi, Zhornist and Safranchuk, 2022). Kita akan melihat sejauh mana peran aktif Indonesia di empat isu tersebut.

Di masa kepemimpinan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia didominasi oleh kebijakan yang berorientasi domestik (*domestic centric*). Secara personal, Jokowi cenderung tidak menyukai forum-forum internasional. Ia tidak pernah hadir secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB. Baginya, politik luar negeri adalah tentang mengejar keuntungan terutama mendatangkan investasi. Ia memanfaatkan forum-forum multilateral sekadar sebagai sarana pertemuan bilateral untuk menjajaki kerjasama yang lebih konkret. Alhasil, di masa Jokowi multilateralisme adalah alat kepentingan nasional alih-alih kepentingan inter-nasional (lihat misalnya Rosyidin, 2019; Rosyidin dan Kusumawardhana, 2022; Rosyidin, 2023). Di periode pertama kepemimpinan Jokowi, Indonesia cenderung berpaling dari ASEAN dan beralih ke forum lain semisal IORA yang lebih mengakomodir kepentingan Indonesia di bidang maritim (Rosyidin and Pattipeilohy, 2020). Singkatnya, kepribadian Jokowi yang pragmatis berpengaruh besar pada orientasi politik luar negeri Indonesia yang pada masa sebelumnya sangat aktif di tingkat internasional berubah ke *domestic centric*.

Namun demikian, orientasi domestik kebijakan luar negeri Jokowi tidak berarti Indonesia mengabaikan peran aktifnya di kancah internasional. Secara obyektif Indonesia masih aktif memainkan peran-peran internasional penting. Pada 2015 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menampik anggapan bahwa politik luar negeri Indonesia *inward-looking*. Ia mengatakan bahwa komitmen pada isu-isu internasional masih menjadi prioritas kebijakannya. Indonesia berpartisipasi aktif dalam banyak isu internasional seperti berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Menurut Retno, hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penguatan hubungan internasional dan kemauan untuk mengintegrasikan diri ke dalam komunitas internasional (The Jakarta Post, 2015).

Peran aktif Indonesia mendukung tatanan internasional mulai terlihat jelang berakhirnya periode pertama pemerintahan Jokowi. Indonesia kembali menunjukkan peran tradisionalnya sebagai *norms entrepreneur* dengan menyodorkan gagasan demi terciptanya dunia yang lebih aman, stabil, damai, dan berkeadilan. Pada 2018 misalnya, Indonesia melalui Retno Marsudi mendorong DK PBB untuk lebih banyak mengirimkan pasukan perdamaian perempuan (*female peacekeeper*). Menurutnya, perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal sehingga lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksploitasi seksual dan tindakan kekerasan (CNN Indonesia, 2018). Usulan ini akhirnya diadopsi oleh DK PBB dengan dikeluarkannya Resolusi 2538 DK PBB tahun 2020. Salah satu poin resolusi itu berbunyi, "Recognizing the indispensable role of women in increasing the overall performance and effectiveness of peacekeeping operations" (UN, 2020).

Selain isu kesetaraan gender, ada tiga resolusi lain yang berhasil disahkan saat Indonesia menjabat presidensi DK PBB pada periode 2019-2020 yaitu resolusi perpanjangan mandat pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Somalia (UNSOM), dan resolusi perpanjangan sanksi di Mali (Sekretariat Kabinet RI, 2020). Indonesia juga memperjuangkan perdamaian di Palestina dengan pendekatan solusi dua negara (*two state solution*) dan penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Komitmen perdamaian dunia juga ditunjukkan Indonesia kepada Afganistan dengan dikeluarkannya Resolusi 2460 DK PBB tentang perpanjangan misi perdamaian PBB di Afganistan. Dalam menyikapi

isu terorisme, Indonesia menjadi pihak yang memprakarsai Press Statement DK PBB mengenai aksi-aksi terorisme di sejumlah negara (Kumaran, 2019).

Indonesia juga menunjukkan kepemimpinannya di Indo-Pasifik dengan menyodorkan gagasan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan disepakati seluruh anggota ASEAN pada 2019. Melalui gagasan ini, Indonesia menegaskan perannya sebagai pemimpin regional yang bertanggungjawab terhadap arsitektur keamanan di Indo-Pasifik yang tidak didominasi baik oleh paradigma China melalui ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) maupun AS melalui ‘Free and Open Indo-Pacific’ (FOIP). Indonesia – melalui wadah ASEAN – ingin mengatakan kepada dunia bahwa ASEAN punya cara sendiri dalam memandang hubungan internasional di Indo-Pasifik dimana di kawasan itu tidak boleh ada negara besar manapun yang mendominasi (Acharya, 2019). AOIP adalah cara Indonesia mengelola keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Sebagaimana dikatakan Bull (1977:201), dua tugas pokok negara besar menjaga tatanan internasional adalah mengelola keseimbangan kekuatan dan mencegah serta mengendalikan krisis internasional. AOIP merupakan gagasan normatif sebagai cara mengelola hubungan internasional di Indo-Pasifik dengan berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu keterbukaan, transparansi, inklusivitas, berbasis aturan, pemerintahan yang baik, penghormatan kepada kedaulatan, non-intervensi, konsisten dengan kerjasama-kerjasama yang sudah ada, kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan menghormati hukum internasional (ASEAN, 2019).

Kontribusi Indonesia dalam forum multilateral bergengsi adalah presidensi G20 tahun 2022. Mengambil tema “recover together, recover stronger” Indonesia memimpin KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 dengan memprioritaskan pada arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi. Meski G20 bukan forum yang secara khusus membahas soal politik tingkat tinggi, namun pada praktiknya forum ini tak lepas dari isu politik. Terlebih pada saat KTT G20 diselenggarakan perang tengah berkecamuk di Ukraina menyusul invasi Rusia pada awal 2022. Oleh sebab itu, saat menyampaikan pidato pembukaan Presiden Jokowi menyinggung krisis keamanan di Ukraina dengan mengatakan, “Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation dan future generations” (CNBC Indonesia, 2022b). Walaupun di pernyataan tersebut tidak menyebut nama ‘Rusia’ dan ‘Ukraina’, namun konteks politik global pada saat itu jelas menunjukkan bahwa kalimat ini ditujukan kepada kedua negara tersebut secara khusus dan dunia internasional secara umum agar menghentikan peperangan.

Diskusi tentang perang Rusia-Ukraina sempat alot untuk mencari titik temu karena 20 negara anggota G20 memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing sehubungan dengan konflik tersebut. Secara umum G20 tampaknya terbelah antara kubu pro-Ukraina (yang diwakili negara-negara Barat), kubu pro-Rusia (diwakili China), dan negara-negara yang memilih netral (Indonesia, India, Turki, dan sejumlah negara berkembang lain). Meski begitu, Indonesia akhirnya mampu menjembatani perbedaan itu dengan disepakatinya deklarasi bersama seluruh delegasi. Salah satu poin deklarasi itu adalah kesepakatan negara-negara anggota G20 mengecam invasi Rusia ke Ukraina sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas wilayah serta menyatakan bahwa perang tersebut berdampak serius terhadap perekonomian global (The White House, 2022). Terlepas dari kegagalan Indonesia mendorong resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina, keberhasilan G20 menghasilkan deklarasi bersama menunjukkan Indonesia telah berperan sebagai ‘pembangun jembatan’ (bridge builder) yang efektif di forum G20.

Sementara itu, terkait isu perubahan iklim peran Indonesia bisa dikatakan cukup aktif. Walaupun faktanya Indonesia menduduki peringkat tujuh negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia – berturut-turut setelah China, AS, India, Uni Eropa, Rusia, Jepang, dan Brazil (Friedrich, Ge, Pickens and Vigna, 2023), namun di saat bersamaan Indonesia juga berkomitmen terhadap upaya pengurangan dampak perubahan iklim global. Ketika baru dilantik menjadi presiden, Jokowi mengutarakan komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030. Komitmen tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap kesepakatan global penurunan suhu bumi sebesar dua derajat Celcius (BBC Indonesia, 2015). Pada KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015, Jokowi mengatakan bahwa, “Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi” (Sekretariat Kabinet RI, 2015). Pada 2021, Indonesia menyerahkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC. Pemerintah telah mengalokasikan 4.1 persen dari APBN untuk upaya pengurangan emisi. Dari 2018 sampai 2020, proyek kebijakan pengurangan emisi telah menyedot anggaran sebesar Rp. 102.6 triliun (Bappenas, 2021). Menurut klaim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2023 Indonesia berhasil mencapai realisasi penurunan emisi CO₂ mencapai 127.67 juta ton, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 116 juta ton (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2024).

Komitmen Indonesia tentu tak bisa hanya dilihat dari retorika di forum multilateral, akan tetapi sejauh mana Indonesia berkontribusi lewat gagasan dan aksi konkret solusi mengatasi dampak perubahan iklim. Pada 2016 Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) dan menjadi negara ke-85 yang meratifikasi UNFCCC. Terobosan terpenting dilakukan di sela-sela KTT G20 di Bali tahun 2022. Ada tiga kontribusi Indonesia dalam kampanye global penanggulangan dampak perubahan iklim. Pertama, menginisiasi Asia Zero Emissions Community (AZEC) bekerjasama dengan Jepang. Kedua negara menyadari bahwa pembangunan ekonomi tak boleh mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, sektor energi dan ekonomi harus saling bekerjasama mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seraya menjaga lingkungan dengan mengubah energi menuju netralitas karbon/emisi nol bersih. Kedua negara juga mendorong negara-negara Asia lainnya untuk bergabung ke dalam inisiatif ini (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Sebagai tindak lanjut inisiatif itu, pada 2023 Jepang memberikan dukungan terhadap 24 proyek transisi energi di Indonesia. Kedua, Indonesia dan International Partners Group (IPG) – konsorsium negara-negara maju untuk pembiayaan program pengurangan emisi – meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Dengan komitmen awal US\$ 20 miliar, JETP Indonesia menjadi paket pembiayaan transisi energi terbesar di dunia hingga saat ini (JETP Indonesia, 2023:1). Ketiga, pada KTT G20 di Bali Indonesia secara simbolik mengkampanyekan aksi menanggulangi dampak perubahan iklim dengan menanam benih mangrove di Taman Hutan Raya, Ngurah Rai, Denpasar. Sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia – 3.3 juta hektare – Indonesia ingin berkontribusi pada perubahan iklim dunia (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022).

Dimensi sosial status Indonesia

Status negara besar tidak dapat diatribusikan kepada negara apabila masyarakat internasional tidak memberikan pengakuan kepada negara tersebut. Pengakuan identik dengan rasa hormat. Menurut Wolf (2011:106), “Respect, it will be argued, is particularly important because of the implicit acceptance that it signals for an actor’s rank.” Pengakuan status negara besar direalisasikan dengan ‘penanda status’ (status marker), yakni posisi atau protokol yang menyimbolkan prestise dan martabat. Penanda ini berupa keanggotaan di lembaga-lembaga internasional elit seperti G8, DK PBB, peran kepemimpinan di organisasi internasional, menjadi penyelenggara event olahraga kelas dunia, dikunjungi perwakilan dari negara-negara besar, diundang dalam pertemuan tingkat tinggi

forum bergengsi, atau dilibatkan dalam proses penyelesaian suatu masalah global (Paul, Larson and Wohlforth, 2014:10-11). Tulisan ini akan menggunakan beberapa indikator tersebut untuk menganalisis pengakuan dunia terhadap status Indonesia.

Pertama, keanggotaan Indonesia di lembaga-lembaga prestisius internasional. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia tercatat pernah sekali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yaitu di periode 2019-2020. Sebelumnya, Indonesia pernah tiga kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB yaitu periode 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008. Prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB untuk periode 2019-2020 adalah melanjutkan komitmen untuk mendorong perdamaian dunia terutama melalui penyelesaian sengketa secara damai dengan pendekatan dialog serta peningkatan operasi pemeliharaan perdamaian (PKO), membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, membangun kerjasama internasional untuk memerangi terorisme, mendorong suksesnya pembangunan berkelanjutan, serta berkomitmen penuh memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Keanggotaan Indonesia di kursi DK PBB dengan slogan “a true partner for world peace.” Menurut Retno Marsudi, rekam jejak Indonesia mengenai isu perdamaian dunia bukan barang baru. “kalau kita bicara mengenai diplomasi Indonesia, maka Indonesia sebagai agen perdamaian dunia itu sudah kental” (Kontan, 2016).

Selain DK PBB, Indonesia pada 2023 juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB (UNHRC) periode 2024-2026. Ini merupakan yang ketiga kalinya Indonesia duduk di lembaga itu selama pemerintahan Jokowi yaitu pada periode 2015-2017 dan 2020-2022. Lembaga ini cukup prestisius karena bertanggungjawab mendorong promosi dan perlindungan HAM serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Retno Marsudi mengatakan bahwa dengan status keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, hal itu membuktikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Dengan amanah itu, ia menegaskan bahwa “Indonesia konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan dan tingkat global” (Detik, 2019). Pada keanggotaan periode 2024-2026 Indonesia mendapatkan ‘bonus’ berupa terpilih menjadi wakil presiden Dewan HAM PBB. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Febrian A. Ruddyard, terpilih sebagai Wakil Presiden UNHRC untuk periode jabatan 2024.

Kedua, peran kepemimpinan di lembaga-lembaga internasional prestisius. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia telah menorehkan catatan gemilang dalam hal peran kepemimpinan global. Pada 2017 Indonesia memegang keketuaan Indian Ocean Rim Association (IORA). Pada 2020, Indonesia menjabat presidensi DK PBB. Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, lima agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB. Di bawah presidensi Indonesia, DK PBB telah menghasilkan empat resolusi dan tiga pernyataan pers (Sekretariat Kabinet RI, 2020). Peran kepemimpinan Indonesia di lembaga internasional bergengsi adalah saat menjabat presidensi G20 pada 2022. Itu merupakan kali pertama sejak G20 dibentuk tahun 1999. G20 merupakan forum prestisius karena merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen populasi dunia (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Presidensi G20 Indonesia dilandasi semangat untuk memainkan peran sebagai ‘pembangun jembatan’ (bridge builder) antara negara maju dan negara berkembang serta ‘bagian dari solusi’ atas permasalahan-permasalahan global. Retno Marsudi mengatakan, “Tidak banyak negara yang secara konsisten dapat memainkan peran jembatan dengan baik di tengah perbedaan pandangan yang sangat tajam antar negara” (Kementerian Luar Negeri RI, 2024).

Ketiga, menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga berskala internasional. Menyelenggarakan event olahraga berskala internasional menjadi cara banyak negara meningkatkan branding-nya di tingkat internasional. Diplomasi olahraga semacam ini menghasilkan soft power untuk menarik perhatian dan mempengaruhi preferensi publik dunia terhadap negara penyelenggara. Di samping itu, menjadi tuan rumah juga menunjukkan kekuatan ekonomi, kredibilitas, serta aspirasi menjadi negara berpengaruh di kancah politik global (Cornelissen, 2010; Grix and Lee, 2013). Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia setidaknya pernah menjadi tuan rumah empat event olahraga berskala internasional. Pertama, Asian Games tahun 2018. Kedua, MotoGP Mandalika yang pertama kali digelar pada 2022. Ketiga, balapan Formula E di Jakarta pada 2022. Keempat, Piala Dunia U-20 tahun 2023 yang akhirnya batal terlaksana karena isu politik.

Indikator selanjutnya adalah diundang di forum internasional bergengsi. Pertama, Indonesia diundang di KTT G7. Di KTT G7 Jerman tahun 2022, Indonesia diundang dalam kapasitasnya sebagai ketua G20. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kesempatan itu akan dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara G7 bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina serta mencari solusi menghadapi krisis pangan dan energi (CNBC Indonesia, 2022a). Sementara di KTT G7 Jepang tahun 2023, Jokowi mengatakan, “Indonesia akan membawa suara dari global south yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja” (Kompas, 2023b). Kedua, Indonesia diundang di KTT BRICS Afrika Selatan tahun 2023. Sebelumnya, BRICS – Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan – berencana memperluas keanggotaan. Diundangnya Indonesia di KTT itu merupakan bentuk ‘tawaran’ forum negara-negara rising power itu kepada Indonesia untuk bergabung. Namun, Indonesia memutuskan tidak bergabung dengan alasan belum mengirimkan surat ketertarikan (expression of interest letter) dan masih mengkalkulasi untung dan ruginya (Kompas, 2023d). Meski demikian, tawaran status keanggotaan di BRICS kepada Indonesia merupakan pengakuan negara-negara rising power atas status Indonesia.

Dimensi kognitif status Indonesia

Indikator terakhir status negara besar adalah persepsi negara terhadap dirinya sendiri. Persepsi ini erat kaitannya dengan keyakinan negara tersebut mengenai siapa dirinya. Dengan demikian, dimensi kognitif status negara besar tidak dapat dilepaskan dari identitas negara bersangkutan; tentang bagaimana negara tersebut memandang jati dirinya, dari mana konsepsi tentang jati diri itu berasal, serta apa yang ia cita-citakan dengan jati diri tersebut. Miller (2021) menyebut hal ini sebagai ‘narasi negara besar’ (great power narrative), yaitu suatu ekspresi gagasan suatu negara yang berambisi menjadi negara besar. Narasi ini mengungkapkan gagasan tentang bagaimana negara harus berperilaku layaknya negara besar. Berbeda dengan tiga dimensi sebelumnya, dimensi kognitif tidak bisa diukur karena bersifat subjektif. Artinya, variabel ini merupakan perspektif personal dari negara bersangkutan tentang siapa jati dirinya. Thomas Volgy dan kawan-kawan menyebut dimensi kognitif status ini sebagai ‘self-reference attribution’ (Volgy, Corbetta, Grant dan Baird, 2011). Suatu negara bisa saja menyebut dirinya sebagai ‘negara besar’ terlepas dari skeptisisme pihak lain. Meskipun tak bisa diukur secara objektif, dimensi kognitif penting karena tanpa keyakinan diri sebagai negara besar suatu negara tak akan berambisi meningkatkan statusnya. Dengan kata lain, ambisi menjadi negara besar didasari salah satunya oleh keyakinan diri suatu negara bahwa dirinya merupakan negara besar.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, narasi-narasi negara besar cukup sering terekspresikan baik secara verbal maupun simbolik. Berbicara di depan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada 11 Oktober 2018, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia harus berani bilang ‘Indonesia first’, ‘make Indonesia great again’ (Tempo, 2018). Gubernur Lemhanas

yang juga salah satu tim ahli perumus visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla pada pemilu 2014, Andi Widjajanto, secara eksplisit mengatakan dirinya tidak terlalu suka sebutan bahwa Indonesia adalah negara middle power. Ia mengatakan, “Saya tidak pernah terlalu suka dengan menyebut Indonesia sebagai middle power, saya lebih senang menyebut Indonesia itu sebagai kekuatan regional. Regional power karena nanti ukurannya bisa disesuaikan, mau kekuatan yang tengah, yang besar, tinggal disesuaikan saja. Regionalnya juga bisa kita sesuaikan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Pasifik. Bisa kita sesuaikan dengan sesuai dengan proyeksi ke depan Indonesia” (Lemhanas RI, 2022).

Keyakinan tentang identitas sebagai negara besar juga terefleksi dalam pernyataan-pernyataan presiden. Dalam pidatonya di KTT APEC Beijing tahun 2014, Jokowi menunjukkan peta Indonesia di depan delegasi dan menjelaskan bahwa Indonesia berpenduduk 240 juta jiwa dengan luas wilayah merentang dari London ke Istanbul serta terdiri dari 17 ribu pulau (Sekretariat Kabinet RI, 2014b). Penjelasan Jokowi ini secara implisit mencerminkan bagaimana elit berpikir tentang Indonesia, yaitu bahwa Indonesia merupakan negara besar – dalam pengertian geografis. Aspek geografis ini turut membentuk pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh bermental kecil. Sebaliknya, Indonesia yakin bisa menjadi negara besar dengan modal yang ada. Di pidatonya saat pelantikan di gedung MPR, 20 Oktober 2014, juga merepresentasikan pola pikir ini. Jokowi menyatakan, “Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global [cetak miring ditambahkan]” (Sekretariat Kabinet RI, 2014a). Saat memberikan sambutan pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 Presiden Jokowi juga mengatakan, “Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin” (Kompas, 2023c).

Narasi negara besar juga terekspresikan baik secara verbal maupun simbolik dalam gagasan ‘Poros Maritim Dunia’. Pada pidatonya di KTT ke-9 Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014, Jokowi menegaskan ambisi Indonesia menjadi poros maritim dunia, yakni kekuatan yang berada di antara dua samudera; Pasifik dan Hindia. Ia melanjutkan, “Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. ... Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia” (Sekretariat Kabinet RI, 2014c). Pernyataan ini secara implisit menunjukkan aspirasi Indonesia menjadi kekuatan berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia tidak mau sekadar menjadi penonton (spectator) melainkan harus menjadi pemain kunci, game changer di Indo-Pasifik. Narasi semacam ini lazim bagi negara-negara rising power yang berambisi menaiki tangga status sebagai negara besar.

Penegasan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang besar juga tercermin dalam pidato Jokowi di sidang International Maritime Organization (IMO) tahun 2016. Jokowi menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen mengembalikan kejayaan Indonesia di lautan, jalesveva jayamahe, menjadi kekuatan dunia di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, serta titik tumpu (fulcrum) dua samudera besar (Sekretariat Kabinet RI, 2016). Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Musyawarah Nasional ke-II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo), 8 Oktober 2021, menyatakan bahwa gagasan Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia negara maritim yang besar, kuat, dan makmur (Kementerian Sekretariat Negara, 2021). Pada peringatan Hari Maritim Nasional tahun 2021, Jokowi kembali menyatakan bahwa aspirasi menjadi Poros Maritim Dunia “akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman kita” (Detik, 2021).

Pernyataan-pernyataan di atas merepresentasikan alam bawah sadar elit pemerintah Indonesia bahwa menjadi negara besar dengan bertumpu pada sektor maritim bukan saja sebuah tujuan yang harus dikejar melainkan takdir sejarah. Poros Maritim Dunia bukan sekadar aspirasi atau cita-cita berorientasi ke depan, tetapi juga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang mewarisi kejayaan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Poros Maritim Dunia adalah ikhtiar pemerintahan Presiden Jokowi mengulangi kebesaran Kerajaan Sriwijaya pada abad-8 dan Kerajaan Majapahit pada abad-14. Gagasan ini mencerminkan ‘kultus kemegahan’ (cult of glory) masa lalu Nusantara (Rosyidin, 2021).

Simbolisasi status negara besar juga terekspresikan dalam kebijakan penguatan sektor pertahanan. Hal ini terutama muncul saat Kementerian Pertahanan dipimpin Prabowo Subianto, seorang sosok militer yang berpandangan nasionalis. Saat menyambut mahasiswa baru di kampus UPN ‘veteran’ Jakarta, 8 Agustus 2023, Prabowo mengatakan, “terkadang kita semua lupa bahwa kita adalah negara besar” (UPNVJ, 2023). Di PT Dirgantara Indonesia, Prabowo kembali mengatakan bahwa kebesaran Indonesia membuat iri bangsa-bangsa lain; “Bangsa kita sangat kaya, sangat besar, dan karena itu bangsa kita selalu diirikan oleh bangsa-bangsa lain” (CNN Indonesia, 2023). Kebijakan paling menonjol dari kepemimpinan Prabowo Subianto adalah modernisasi alutsista besar-besaran. Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, Indonesia sudah menekan kontrak pengadaan lusinan pesawat tempur dari Perancis dan AS. Belum lagi pengadaan kapal selam dan armada laut lainnya. Walaupun modernisasi alutsista ini dimaksudkan semata-mata demi tujuan defensif bukan ofensif, namun ambisi penguatan sektor pertahanan ini tak lepas dari mimpi Prabowo menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang memiliki kesiapsiagaan militer menghadapi setiap ancaman. Modernisasi militer mencerminkan ‘status signaling’ Indonesia sebagai negara besar (Rosyidin and Kusumawardhana, tanpa tahun). Artinya, penguatan sektor pertahanan tersebut dilakukan bukan semata-mata karena faktor kebutuhan tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa Indonesia adalah negara besar. Jadi, menjadi negara besar bukan hanya tujuan tetapi juga alasan mengapa Indonesia perlu memperkuat postur pertahanannya.

Narasi negara besar juga muncul saat kontestasi pemilu 2024. Anies Baswedan yang maju sebagai calon presiden mengatakan, “Ini negara besar, ini bangsa besar, demokrasi salah satu yang terbesar, penduduk terbesar, kekayaan alam terbesar. Kita harus menjadi major player di kawasan Asia dan dunia” (Katadata Indonesia, 2023). Di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Anies mengulang kembali narasi yang sama bahwa “kita berada di klub negara-negara besar, bagian dari G20, tapi agenda-agenda negara maju dan besar itu tidak menjadi bagian dari kita” (CSIS Indonesia, 2023). Begitu pula dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat penyampaian visi-misi di acara debat cawapres 21 Januari 2024 mengatakan bahwa “Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya” (Metro TV, 2024). Meskipun Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka sama-sama mengacu pada faktor geografis dan bukan faktor sejarah sebagai landasan berpikir, namun keduanya sama-sama meyakini bahwa Indonesia adalah negara besar. Baik faktor geografis maupun historis sama-sama mendasari keyakinan para elit pemerintah bahwa Indonesia bukan negara menengah apalagi kecil tetapi negara besar.

KESIMPULAN

Apakah Indonesia merupakan negara middle power? Kebanyakan akademisi menjawab ‘ya’. Tapi tulisan ini meragukan pendapat para akademisi itu. Hal ini dikarenakan literatur yang sudah ada terjebak pada konsep middle power diplomacy yang berfokus pada dimensi behavioral kebijakan luar negeri. Dengan bingkai analitis itu, maka secara apriori para akademisi melabeli Indonesia sebagai

middle power. Dengan kata lain, status Indonesia sebagai middle power telah diterima begitu saja (taken for granted) oleh para ilmuwan. Tulisan ini berangkat dari klaim bahwa status suatu negara – apakah sebagai negara besar, menengah, atau kecil – harus melihat dari semua dimensi yaitu material, behavioral, sosial, dan psikologis. Mengistimewakan salah satu dimensi akan memunculkan kategorisasi yang kurang akurat. Oleh karena itu riset ini mengombinasikan keempat perspektif – realisme, English School, konstruktivisme, dan psikologi – untuk menentukan status Indonesia dalam struktur hirarki internasional. Analisis komprehensif ini menempatkan masing-masing variabel sebagai variabel terpisah satu sama lain. Berbeda dengan analisis eklektik dimana variabel satu melengkapi kekurangan variabel lain, analisis komprehensif melihat bahwa untuk menentukan status suatu negara perlu analisis terhadap keempat variabel tersebut tanpa mengecualikan salah satunya. Hasilnya, berdasarkan analisis keempat dimensi tersebut, maka Indonesia kurang tepat bila dianggap sebagai negara middle power. Indonesia juga kurang tepat dianggap sebagai negara besar. Indonesia lebih tepat dianggap sebagai intermittent major power atau upper-middle power, yaitu negara yang berada di tengah-tengah antara negara besar dan middle power. Dilihat dari dimensi material (ekonomi dan militer), Indonesia masih tergolong kekuatan menengah. Dilihat dari dimensi behavioral (karakter diplomasi), Indonesia memiliki karakter negara besar meskipun juga konsisten dengan diplomasi kekuatan menengah. Dilihat dari dimensi sosial (pengakuan internasional), Indonesia sudah termasuk negara besar. Terakhir, dilihat dari dimensi psikologis (konsepsi diri), Indonesia merasa dirinya sebagai negara besar. Indonesia sedang merangkak naik menuju status sebagai negara besar namun belum sampai di tujuan. Faktor penghambat utama adalah elemen material khususnya kapabilitas militer yang masih minim.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa studi-studi tentang status dalam HI perlu melihat dimensi sosial dan psikologis. Para pakar sepakat bahwa status adalah kedudukan negara yang memerlukan pengakuan. Namun, studi tentang pengakuan internasional masih terbilang minim. Para pakar juga sepakat bahwa status harus diakui oleh negara bersangkutan karena mustahil negara menjadi negara besar tanpa didorong oleh keinginan dari negara bersangkutan. Namun, studi tentang dimensi psikologis status negara besar juga masih sangat langka. Temuan ini juga berimplikasi pada perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, pemerintah terpilih (pemenang pemilu 2024) perlu merumuskan strategi besar baru sebagai peta jalan Indonesia mempercepat peningkatan status menuju negara besar. Melihat dimensi material masih kurang, maka pemerintah ke depan perlu merumuskan langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif – di atas lima persen per tahun – dan meningkatkan persentase anggaran militer menjadi minimal dua persen dari PDB. Kedua, pemerintah perlu memastikan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan lebih asertif dan berorientasi ke luar (outward looking) dengan lebih aktif terlibat dalam upaya-upaya pemecahan masalah global. Ketiga, mindset bahwa Indonesia adalah kekuatan regional di Asia Tenggara perlu diubah. Pemerintah harus berpikir bahwa kawasan Asia Tenggara terlalu kecil bagi Indonesia dan Indonesia terlalu besar bagi Asia Tenggara. Walaupun kepentingan Indonesia berjangkauan global, namun Indonesia harus lebih aktif menjadi game changer di kawasan Indo-Pasifik.

REFERENCES

- Acharya, A. (2019). Why ASEAN's Indo-Pacific outlook matters. Tersedia di: <https://eastasiaforum.org/2019/08/11/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/>
- Acharya, A. (2014) *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. Singapore: World Scientific.

- Agastia, I.G.B.D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': a role theory approach. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 7(3), 293-305. doi: <https://doi.org/10.1002/app5.308>
- Alfian, R.A., Putri, G.C., dan Ardhani, I. (2018). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 151-168. doi: <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Anas, T., Hill, H., Narjoko, D., & Putra, C.T. (2022). The Indonesian economy in turbulent times. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 241-271. doi: <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2133344>
- Anwar, D.F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111-129. doi: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>
- ASEAN. (2021). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tersedia di: https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf
- Bappenas. (2021). Updated Indonesia Untuk Masa Depan yang Tangguh Iklim. Tersedia di: <https://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/>
- BBC Indonesia. (2015). Komitmen Indonesia di KTT perubahan iklim diragukan. Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151129_indonesia_jokowi_cop21
- Bisnis. (2023). Indonesia beli 2 helikopter Sikorsky S-70M, ini harga dan spesifikasinya. Tersedia di: <https://kabar24.bisnis.com/read/20230825/15/1688262/indonesia-beli-2-lusin-helikopter-sikorsky-s-70m-black-hawk-ini-harga-dan-spesifikasinya>
- Bull, H. (1977). *The Anarchical Society: the Study of Order in World Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- CIA. (tanpa tahun). Country comparisons: military expenditures. Tersedia di: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/military-expenditures/country-comparison/>
- CNBC Indonesia. (2022a). Simak pernyataan lengkap Jokowi sebelum berangkat ke G7. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220626164524-4-350488/simak-pernyataan-lengkap-jokowi-sebelum-berangkat-ke-g7>
- CNBC Indonesia. (2022b). Pidato lengkap Jokowi di KTT G20: krisis hingga perang dingin. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221115103852-4-388047/pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g20-krisis-hingga-perang-dingin>
- CNBC Indonesia. (2023a). Prabowo beli kapal selam siluman, punya rudal bawah laut. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230314091340-4-421421/prabowo-beli-kapal-selam-siluman-punya-rudal-bawah-laut>
- CNBC Indonesia. (2023b). Akhir November 2023, utang pemerintah tembus Rp. 8.401 T. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231219100526-4-498462/akhir-november-2023-utang-pemerintah-tembus-rp8041-t>
- CNN Indonesia. (2018). Di DK PBB Menlu bahas peran perempuan di pasukan perdamaian. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180329182008-134-286934/di-dk-pbb-menlu-bahas-peran-perempuan-di-pasukan-perdamaian>
- CNN Indonesia. (2023). Prabowo: Indonesia kaya dan besar, buat iri bangsa lain. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230615170131-32-962417/prabowo-indonesia-kaya-dan-besar-buat-iri-bangsa-lain>

- Cornelissen, S. (2010). The geopolitics of global aspiration: sport mega-events and emerging powers. *International Journal of the History of Sport*, 27(16-18), 3008-3025. doi: <https://doi.org/10.1080/09523367.2010.508306>
- CSIS Indonesia. (2023). Pidato calon presiden Republik Indonesia: arah dan strategi politik luar negeri. Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=ISfjRiXASX8>
- Dafoe, A., & Caughey, D. (2016). Honor and war: Southern US presidents and the effects of concern for reputation. *World Politics*, 68(2), 341-381. doi: <https://doi.org/10.1017/S0043887115000416>
- Dafoe, A., Renshon, J., & Huth, P. (2014). Reputation and status as motives for war. *Annual Review of Political Science*, 17(1), 371-393. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-071112-213421>
- Detik. (2019). RI terpilih lagi jadi anggota Dewan HAM PBB, Menlu Retno: ini amanah. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-4750257/ri-terpilih-lagi-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-menlu-retno-ini-amanah>
- Detik. (2021). Jokowi: Indonesia bangsa maritim harus kita kokohkan, jangan jargon semata. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5737016/jokowi-indonesia-bangsa-maritim-harus-kita-kokohkan-jangan-jargon-semata>
- Friedrich, J., Ge, M., Pickens, A., & Vigna, L. (2023). This interactive chart shows change in the world's top 10 emitters. Tersedia di: <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>
- Gindarsah, I., & Priamarizki, A. (2021). Explaining Indonesia's under-balancing: the case of the modernisation of the Air Force and Navy. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 8(3), 391-412. doi: <https://doi.org/10.1177/23477970211039645>
- Grix, J., & Lee, D. (2013). Soft power, sports mega-events and emerging states: the lure of the politics of attraction. *Global Society*, 27(4), 521-536. doi: <https://doi.org/10.1080/13600826.2013.827632>
- Harijanto, C. (2024). Middle-power behaviors: Australia's status quoist/Lockean and Indonesia's reformist/Lockean approaches to crisis of legitimacy in the Indo-Pacific. *Australian Journal of International Affairs*, 78(1), 40-57. doi: <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2283473>
- Hidayatullah, N.L. (2017). Indonesia's role as a middle power: a neo-liberalist and constructivist analysis. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 1-11.
- IISS. (2023). *The Military Balance 2023*. London: Routledge.
- IMF. (2022). Central government debt: percent of GDP. Tersedia di: https://www.imf.org/external/datamapper/CG_DEBT_GDP@GDD/CHN/FRA/DEU/ITA/JPN/GBR/USA
- IMF. (2024). GDP, current prices. Tersedia di: <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN>
- Jakarta Globe. (2023). Indonesian military loses combat readiness due to outdated weaponry: expert. Tersedia di: <https://jakartaglobe.id/news/indonesian-military-loses-combat-readiness-due-to-outdated-weaponry-expert>
- Karim, M.F. (2018). Middle power, status-seeking, and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, 72(4), 343-363. doi: <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>

- Karim, M.F., and Nabila, R. (2022). Role conception of the Asia-Pacific middle powers: comparative analysis of Indonesia, South Korea, Australia and Vietnam. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 9(2), 231-254. doi: <https://doi.org/10.1177/23477970221098469>
- Katadata Indonesia. (2023). Anies Baswedan: Indonesia harus jadi pemain utama di dunia. Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=-7QdK8HVXvU>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2022). Jepang-Indonesia inisiasi Asia Zero Emission Community. Tersedia di: <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/jepang-indonesia-inisiasi-asia-zero-emission-community>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2024). Pemerintah Sukses Tekan Emisi GRK dan Intensitas Energi Primer. Tersedia di: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sukses-tekan-emisi-grk-dan-intensitas-energi-primer#:~:text=Pemerintah%20Indonesia%20berhasil%20mencapai%20realisasi,sebesar%20116%20juta%20ton%20CO2e.>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). Diplomasi mangrove ala Jokowi di KTT G20. Tersedia di: https://www.kominfo.go.id/content/detail/45758/diplomasi-mangrove-ala-jokowi-di-ktt-g20/0/artikel_gpr
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Keanggotaan Indonesia pada DK PBB. Tersedia di: https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). Presidensi G20 Indonesia. Tersedia di: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024). Pidato Menlu pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2024. Tersedia di: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5658/pidato/pidato-menlu-pada-pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2024>
- Kementerian Pertahanan RI. (2023a). TNI AU tambah 5 pesawat C-130J, pesawat pertama akan tiba awal Maret 2023 dari AS. Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2023/02/22/tni-au-tambah-5-pesawat-c-130-j-pesawat-pertama-akan-tiba-awal-maret-2023-dari-as.html>
- Kementerian Pertahanan RI. (2023b). Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru dari AS. Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2023/08/22/menhan-prabowo-perkuat-tni-melalui-pembelian-24-pesawat-tempur-f-15ex-baru-dari-as.html>
- Kementerian Pertahanan RI. (2024). Menhan Prabowo datangkan 42 pesawat tempur Rafale dari Prancis, TNI AU akan semakin menggentarkan. Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2024/01/09/menhan-prabowo-datangkan-42-pesawat-tempur-rafale-dari-prancis-tni-au-akan-semakin-menggentarkan.html>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2021). Wujudkan Indonesia jadi poros maritim dunia, perlu peran semua pihak. Tersedia di: https://www.setneg.go.id/baca/index/wujudkan_indonesia_jadi_poros_maritim_dunia_perlu_peran_semua_pihak
- Kompas. (2023a). MEF dinilai sulit terpenuhi, militer butuh strategi baru. Tersedia di: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/17/mef-dinilai-sulit-terpenuhi-militer-butuh-strategi-baru>
- Kompas. (2023b). Hadiri undangan KTT G7, Jokowi ingin suara negara berkembang didengar oleh negara-negara maju. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/19/13351461/hadiri-undangan-ktt-g7-jokowi->

ingin-suara-negara-berkembang-didengar-oleh

- Kompas. (2023c). Jokowi: Indonesia negara besar, harus duduk sejajar dengan negara lain. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/01/11123361/jokowi-indonesia-negara-besar-harus-duduk-sejajar-dengan-negara-lain>
- Kompas. (2023d). Jokowi tegaskan Indonesia belum gabung jadi anggota BRICS. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/21174491/jokowi-tegaskan-indonesia-belum-gabung-jadi-anggota-brics>
- Kontan. (2016). JK buka kampanye RI jadi anggota DK PBB. Tersedia di: <https://nasional.kontan.co.id/news/jk-buka-kampanye-ri-jadi-anggota-dk-pbb>
- Kumparan. (2019). 4 capaian Indonesia di DK PBB selama 3 bulan bertugas. Tersedia di: <https://kumparan.com/kumparannews/4-capaian-indonesia-di-dk-pbb-selama-3-bulan-bertugas-1553775680034774719/full>
- Larson, D.W., & Shevchenko, A. (2010). Status seekers: Chinese and Russian response to US primacy. *International Security*, 34(4), 63-96. doi: <https://doi.org/10.1162/isec.2010.34.4.63>
- Larson, D.W., & Shevchenko, A. (2019). *Quest for Status: Chinese and Russian Foreign Policy*. New Haven: Yale University Press.
- Lemhanas RI. (2022). Dorong Indonesia jadi kekuatan maritim, Andi Widjajanto: Indonesia butuh perencanaan sampai 2070. Tersedia di: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1685-dorong-indonesia-jadi-kekuatan-maritim-andi-widjajanto-indonesia-butuh-perencanaan-sampai-2070>
- Levy, J. (1983). *War in the Modern Great Power System: 1495-1975*. Lexington: Kentucky University Press.
- Metro TV. (2024). Penyampaian visi misi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=JzzwyA-Kxac>
- Miller, M.C. (2021). *Why Nations Rise: Narratives and the Path to Great Power*. New York: Oxford University Press.
- Murray, M. (2018). *The Struggle for Recognition in International Relations: Status, Revisionism, and Rising Powers*. New York: Oxford University Press.
- Nesmashnyi, A., Zhornist, V., & Safranchuk, I. (2022). International hierarchy and functional differentiation of states: results of an expert survey. *MGIMO Review of International Relations*, 15(3), 7-38. doi: <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2022-olf2-supl>
- Patton, S., Sato, J., and Lemahieu, H. (2023). *Lowly Institute Asia Power Index: 2023 Key Findings Report*. Sidney: Lowly Institute.
- Paul, T.V., Larson, D.W., & Wohlforth, W. (2014). *Status in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ping, J. (2005). *Middle Power Statecraft: Indonesia, Malaysia, and the Asia Pacific*. London: Routledge.
- Reid, A. (2012). *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore: ISEAS.
- Renshon, J. (2016). Status deficits and war. *International Organization*, 70(3), 513-550. doi: <https://doi.org/10.1017/S0020818316000163>
- Renshon, J. (2017). *Fighting for Status: Hierarchy and Conflict in World Politics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Roberts, C., Habir, A., & Sebastian, L. (2015). *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the*

Regional Order. New York: Palgrave Macmillan.

- Rosyidin, M. (2019). *Indonesia Menuju Kekuatan Dunia Abad-21: Politik Luar Negeri di Era Joko Widodo*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rosyidin, M. (2021). The cult of glory: national myth and the idea of Global Maritime Fulcrum in Indonesia's foreign policy, 2014-2019. *South East Asia Research*, 29(3), 297-314. doi: <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1954484>
- Rosyidin, M. (2023). Pragmatisme multilateral dalam momen keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022-2023. *Politica*, 14(2), 131-152. doi: <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4123>
- Rosyidin, M., & Kusumawardhana, I. (2022). Participating for profit: bilateral-multilateral nexus in Indonesian foreign policy in the era of Joko Widodo (2014-2019). *Politik Indonesia*, 7(1), 11-35.
- Rosyidin, M., & Kusumawardhana, I. (tanpa tahun). Major power wannabe: military modernization and Indonesia's status signaling under Yudhoyono and Widodo. Manuskrip tidak dipublikasikan.
- Rosyidin, M., & Pattipeilohy, S.C.H. (2020). Regionalism under challenge: ideas and Joko Widodo's foreign policy towards ASEAN, 2014-2019. *Journal of ASEAN Studies*, 8(2), 147-172. doi: <https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6596>
- Rosyidin, M., and Kusumawardhana, I. (2024). Neither promoting nor projecting democracy: Indonesia's middlepowermanship in the Bali democracy forum under Joko Widodo. *International Relations of the Asia-Pacific*, 24(1), 65-100. doi: <https://doi.org/10.1093/irap/lcad002>
- Rosyidin, M., and Ramadhani, K.S. (2023). *Diplomasi Middle Power Indonesia di G20 dan Bali Democracy Forum*. Yogyakarta: Journal Publishing.
- Sekretariat Kabinet RI. (2014a). Pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di gedung MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2014. Tersedia di: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-republik-indonesia-di-gedung-mpr-senayan-jakarta-20-oktober-2014/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2014b). Remarks by Indonesian President Joko Widodo at the APEC CEO Summit on November 10, 2014 in Beijing, China. Tersedia di: <https://setkab.go.id/remarks-by-indonesian-president-joko-jokowi-widodo-at-the-apec-ceo-summit-on-november-10-2014-in-beijing-china/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2014c). Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014. Tersedia di: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2015). Presiden Jokowi sampaikan komitmen Indonesia turunkan emisi 29%. Tersedia di: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-turunkan-emisi-29/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2016). Pidato di sidang IMO Presiden Jokowi komitmen jadikan Indonesia poros maritim dunia. Tersedia di: <https://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2020). Selesai Agustus 2020, ini capaian Indonesia sebagai presidendi Dewan Keamanan PBB. Tersedia di: <https://setkab.go.id/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb/>
- Shekhar, V. (2018). *Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an*

Indo-Pacific Power. New York: Routledge.

- Sil, R., & Katzenstein, P. (2010). *Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- SIPRI. (2022). SIPRI military expenditure database. Tersedia di: <https://milex.sipri.org/sipri>
- Sukma, R. (2014). Gagasan poros maritim dunia. Tersedia di: <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim>
- Tempo. (2018). Prabowo: make Indonesia great again. Tersedia di: <https://en.tempo.co/read/922466/prabowo-make-indonesia-great-again>
- The Jakarta Post. (2015). Retno denies RI too inward looking. Tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/06/15/retno-denies-ri-too-inward-looking.html>
- The White House. (2022). G20 Bali Leaders' Declaration. Tersedia di: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/>
- Thies, C., and Sari, A. (2018). A role theory approach to middle powers: making sense of Indonesia's place in the international system. *Contemporary Southeast Asia* 40(3), 397-421. doi: 10.1355/cs40-3c
- UN. (2020). Resolution 2538. Tersedia di: <https://digitallibrary.un.org/record/3878808?ln=ru>
- UPNVJ. (2023). Menhan RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia jadi high income country dengan mahasiswa UPNVJ yang berkualitas. Tersedia di: <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2023/08/menhan-ri-prabowo-subianto-optimistis-indonesia-jadi-high-income-country-dengan-mahasiswa-upnvj-yang-berkualitas.html>
- Volgy, T., & Mayhall, S. (1995). Status inconsistency and international war: exploring the effects of systemic change. *International Studies Quarterly*, 39(1), 67-84. doi: <https://doi.org/10.2307/2600724>
- Volgy, T., Corbetta, R., Grant, K., & Baird, R. (2011). *Major Powers and the Quest for Status in International Politics: Global and Regional Perspectives*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wallace, M. (1971). Power, status, and international war. *Journal of Peace Research*, 8(1), 23-35. doi: <https://doi.org/10.1177/00223433710080010>
- Ward, S. (2019). Logic of stratified identity management in world politics. *International Theory*, 11(2), 211-238. doi: <https://doi.org/10.1017/S175297191800026X>
- Ward, S.M. (2017). Lost in translation: social identity theory and the study of status in world politics. *International Studies Quarterly*, 61(4), 821-834. doi: <https://doi.org/10.1093/isq/sqx042>
- Wight, M. (1991). *International Theory: The Three Traditions*. Leicester: Leicester University Press.
- Wohlforth, W. (2009). Unipolarity, status competition, and great power war. *World Politics*, 61(1), 28-57. doi: <https://doi.org/10.1017/S0043887109000021>
- Wolf, R. (2011). Respect and disrespect in international politics: the significance of status recognition. *International Theory*, 3(1), 105-142. doi: <https://doi.org/10.1017/S1752971910000308>
- World Bank. (2022). Upper middle income countries 2022. Tersedia di: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID-XT>

Copyright holder:

Mohamad Rosyidin (2023)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

